

Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Berbasis Uud 1945, Dalam Penerapan Tantangan Regulasi Dan Persoalan Dalam Industri Migas Indonesia

Edy Soesanto

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id

Amelia Novianti

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

amelianoviantii066@gmail.com

Ani Handayani

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

anihandayani367@gmail.com

Alamat: Jl. Raya Perjuangan No. 81, RT.003/RW.002, Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17143

Korespondensi penulis: Edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

This journal reviews the implementation of national values based on the 1945 Constitution in facing regulatory challenges and problems in the Indonesian oil and gas industry. This research explores how the national values reflected in the 1945 Constitution can be applied in the complex context of the oil and gas industry. The analysis results show that the Indonesian oil and gas industry is faced with various challenges, including complex regulations and suboptimal governance issues. However, implementing national values in oil and gas industry regulations can strengthen the country's energy sovereignty. Steps to increase the implementation of these values include improving regulations that are oriented towards national interests, increasing transparent governance, and a commitment to protecting the environment and surrounding communities. This journal highlights the importance of cooperation between government, industry and society in achieving these goals. The results of the analysis show that the implementation of national values in the Indonesian oil and gas industry is faced with several challenges, such as complex regulations, suboptimal governance, and environmental and social issues that must be addressed. To overcome these challenges, efforts are needed to strengthen the implementation of national values in oil and gas industry regulations, such as improving regulations that are more oriented towards national interests, increasing transparent and accountable governance, and strengthening commitment to efforts to protect the environment and surrounding communities.

Keywords: *implementation, national values, 1945 Constitution, oil and gas industry, regulations, challenges, problems, governance.*

Abstrak

Jurnal ini mengulas implementasi nilai-nilai kebangsaan berbasis UUD 1945 dalam menghadapi tantangan regulasi dan persoalan dalam industri migas Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai kebangsaan yang tercermin dalam UUD 1945 dapat diterapkan dalam konteks industri migas yang kompleks. Hasil analisis menunjukkan bahwa industri migas Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk regulasi yang rumit dan persoalan tata kelola yang belum optimal. Namun, implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam regulasi industri migas dapat memperkuat kedaulatan energi negara. Langkah-langkah untuk meningkatkan implementasi nilai-nilai tersebut termasuk penyempurnaan regulasi yang berorientasi pada kepentingan nasional, peningkatan tata kelola yang transparan, dan komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan masyarakat sekitar. Jurnal ini menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam mencapai tujuan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam industri migas Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti regulasi yang kompleks, tata kelola yang belum optimal, dan isu-isu lingkungan dan sosial yang harus diatasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya untuk

memperkuat implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam regulasi industri migas, seperti penyempurnaan regulasi yang lebih berorientasi pada kepentingan nasional, peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta penguatan komitmen terhadap upaya perlindungan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Kata kunci: implementasi, nilai-nilai kebangsaan, UUD 1945, industri migas, regulasi, tantangan, persoalan, tata kelola.

LATAR BELAKANG

Industri migas telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang pendapatan yang substansial dan menjadi sumber utama energi bagi pertumbuhan dan pembangunan negara. Namun, di balik potensi besar yang dimilikinya, industri ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks, baik dalam hal regulasi maupun aspek ekonominya. Regulasi yang terus berubah, kebijakan investasi yang berfluktuasi, dan persoalan lingkungan menjadi beberapa hal yang menjadi fokus perhatian dalam konteks industri migas di Indonesia. (Bappenas, 2015)

Industri minyak dan gas bumi (migas) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai penyumbang devisa negara maupun sebagai sumber energi utama bagi masyarakat. Sebagai negara dengan potensi sumber daya migas yang besar, Indonesia terus berupaya mengoptimalkan sektor ini untuk mendukung pembangunan nasional. Namun, di balik potensi besar yang dimiliki, industri migas Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam hal regulasi dan tata kelola. (Bagir, 1992)

Dalam menghadapi tantangan tersebut, penting bagi negara untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dan tindakan yang dilakukan selaras dengan nilai-nilai fundamental yang terpatrit dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan dan tindakan pemerintah, termasuk dalam industri migas.

Implementasi nilai-nilai kebangsaan berbasis Undang-Undang Dasar 1945 dapat menjadi landasan yang kuat dalam menghadapi tantangan regulasi dan persoalan dalam industri migas Indonesia. Nilai-nilai seperti keadilan, kebersamaan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dapat menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri migas yang berkelanjutan dan berkeadilan. (Harsono, 2002)

Nilai-nilai kebangsaan yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti kedaulatan, keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan, menjadi panduan penting dalam mengatur dan mengelola industri migas. Implementasi nilai-nilai ini tidak hanya menjadi

prinsip moral, tetapi juga menjadi fondasi bagi kebijakan yang akan memengaruhi masa depan industri migas Indonesia.

Tantangan regulasi yang kompleks dan persoalan tata kelola yang belum optimal menjadi hambatan utama dalam pengembangan industri migas. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang holistik yang tidak hanya memperhatikan aspek teknis, tetapi juga aspek-aspek non-teknis seperti nilai-nilai kebangsaan yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). (Bahrul, 2022)

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menghadapinya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat peran nilai-nilai kebangsaan dalam menjaga kedaulatan energi negara melalui industri Migas Indonesia. (Delliamov, 2006)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai kebangsaan berbasis UUD 1945 dalam menghadapi tantangan regulasi dan persoalan dalam industri migas Indonesia. Penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh industri migas Indonesia, mengkaji implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam regulasi dan tata kelola industri migas, serta merumuskan rekomendasi untuk memperkuat implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam industri migas Indonesia.

Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam menghadapi tantangan regulasi dan persoalan dalam industri migas Indonesia, serta memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri migas yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dalam konteks inilah, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi nilai-nilai kebangsaan berbasis Undang-Undang Dasar 1945 dalam menghadapi tantangan regulasi dan persoalan ekonomi dalam industri migas Indonesia. Dengan memahami keterkaitan antara nilai-nilai kebangsaan dan praktek regulasi serta persoalan ekonomi dalam industri migas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta memperkuat peran industri migas sebagai pilar penting dalam pembangunan nasional.

METODE PENELITIAN

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN BERBASIS UUD 1945, DALAM PENERAPAN TANTANGAN
REGULASI DAN PERSOALAN DALAM INDUSTRI MIGAS INDONESIA**

Metode penulisan yang dilakukan penulis yaitu dengan melakukan kajian Pustaka dan literatur melalui paper, buku, serta media internet untuk menunjang keberhasilan penulis dalam penyusunan.

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia	Rizqon Jamil Farhas, Ratna Riyanti	Membahas mengenai berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan 1945 di bagian konsideran tanpa diikuti dengan tindak lanjut secara konsisten.	Tidak membahas tentang Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai globalisasi perekonomian.
2.	Politik Hukum Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 dalam Upaya Mengembalikan Kedaulatan negara dan Perlindungan HAM.	Habib Shulton Asnawi	Membahas tentang Minyak dan Gas (Migas) menyebutkan bahwa migas merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dipergunakan untuk memberikan kemakmuran bagi rakyat.	Jurnal ini terlalu banyak membahas tentang Pembiaran terhadap pemenuhan HAM rakyat Indonesia khususnya kaitannya dengan BP Migas adalah sebuah bentuk pengingkaran terhadap konvensi internasional dibidang ekonomi social dan budaya, atau disebut dengan hak EKOSOB.
3.	Impementasi pasal 23 undang-undang dasar 22 tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas dalam perspektif fikih siyasah dusturiyyah	Angki Aditya	Implementasi Undang-Undang Nomor Tentang Minyak dan Gas Bumi. Mengingat minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang	Jurnal ini membahas Usaha hulu dan hilir telah diatur dalam Undang-Undang no 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas.

			dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri,	
4.	Menggali Pondasi Karakter Bangsa Dengan Semangat Sumpah Pemuda	Yulies Tiena M, Jeni Susyanti, Andiyan, Eko Nursanty, Herman, Endang Korina,	Membahas tentang nilai-nilai universal dan nilai-nilai kebangsaan yang melandasi suatu karakter	Jurnal ini membahas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan juga merupakan bentuk upaya dalam proses pembangunan bangsa, dimana pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan untuk mewujudkan fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional.
5.	Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945	Zainal Arifin Hoesein	Membahas mengenai reformasi terhadap sistem ekonomi kerakyatan telah dilakukan dalam kerangka reformasi sistem perekonomian yang menyentuh seluruh sub-sistem yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perekonomian yang berbasis rakyat	Jurnal ini merujuk kepada Pasal 33 UUD 1945 dimaksud terlihat jelas bahwa sistem perekonomian nasional Indonesia ditujukan untuk kesejahteraan sosial.

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN BERBASIS UUD 1945, DALAM PENERAPAN TANTANGAN
REGULASI DAN PERSOALAN DALAM INDUSTRI MIGAS INDONESIA**

6.	Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945	Dr. Elli Ruslina, S.H., M.H.	Jurnal ini membahas mengenai Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 (yaitu paham ekonomi berdasar “kebersamaan dan asas kekeluargaan”.	Jurnal ini banyak membahas tentang perkembangan politik yang terjadi pada zaman Orde Baru, kekuatan politik yang berkuasa di seluruh jajaran eksekutif ternyata juga mampu bermanuver dan mendominasi Dewan Perwakilan Rakyat.
7.	Harmonisasi Undang-Undang Dasar 1945 Dengan Ketentuan Internasional Tentang Masyarakat Ekonomi Asean 2015	Desy Churul Aini	Jurnal ini membahas tentang ideologi negara, dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia yang harus dijadikan pedoman, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 harus terkandung di dalam setiap pasal yang ada pada setiap peraturan perundang-undangan	Jurnal ini banyak membahas mengenai berdasarkan cetak biru MEA 2015 ini memuat empat kerangka kerja atau pilar MEA. Disharmonisasi kedua ketentuan tersebut terdapat dalam 4 (empat) hal yang menjadi fokus harmonisasi yaitu dari aspek-aspek hukumnya, pengaturan tentang kewenangan, tujuan pengaturan dan keberpihakan pengaturan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

8.	Peluang dan Tantangan Indonesia Menyongsong Asean Economic Community (Masyarakat Ekonomi Asean) melalui Inovasi Kebijakan dan Manajemen Publik	Ratno, Galih Wibowo, Edoardus E.Maturbongs	Jurnal ini menjelaskan tentang dedikasi penuh rasa tanggung jawab dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara .	Menjelaskan mengenai tentang 'MEA Policy and Strategy128' tertentu yang secara berkala dievaluasi dan dikembangkan untuk terus maju secara bersama di kawasan ASEAN ini.
9.	Rekonstruksi regulasi pasca operasional pada kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang berbasis nilai keadilan	Bahrul Ilmi	Membahas tentang Regulasi kegiatan usaha hulu migas dan gas bumi yang berbasis nilai keadilan	Jurnal ini tidak membahas tentang implementasi nilai nilai kebangsaan yang berbasis UUD 1945
10.	Implementasi nilai-nilai karakter budaya bangsa	Febrian Alwan Bahrudin, Istinganatul Ngulwiyah	Menekankan pentingnya nilai-nilai kebangsaan seperti keadilan dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan dalam industry migas	Implementasi nilai-nilai karakter budaya bangsa lebih menyoroti aspek-aspek sosial dan budaya dalam menghadapi tantangan tersebut.
11.	Potensi dan tantangan blue economy dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia	Marihot Nsution	Pemenuhan kebutuhan energi baik blue economy maupun industry migas merupakan bagian dari Upaya untuk memenuhi kebutuhan energi dan sumber daya alam Indonesia.	Implementai nilai-nilai kebangsaan berbasis UUD 1945 mungkin lebih terkait dengan industry migas yang memiliki Sejarah Panjang dalm pembentukan ekonomi Indonesia sementara blue economy dapat lebih memperkuat kedaulatan maritim dan identitas nasional.

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN BERBASIS UUD 1945, DALAM PENERAPAN TANTANGAN
REGULASI DAN PERSOALAN DALAM INDUSTRI MIGAS INDONESIA**

12.	Dari energi fosil menuju energi terbarukan: potret kondisi minyak dan gas bumi Indonesia tahun 2020-2050	Agus Eko Setyono, Berkah Fajar Tamtomo Kiono	Baik dalam industry migas maupun energi terbarukan, regulasi yang ketat sering kali menjadi hambatan utama dalam pengembangan proyek energi.	Meskipun energi terbarukan semakin berkembang, investasi dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengintegrasikan energi terbarukan kedalam jaringan masih memerlukan perhatian khusus yang berbeda dengan infrastruktur untuk industry migas yang sudah mapan
13.	Dasar perekonomian Indonesia dalam penyimpangan mandat konstitusi UUD negara tahun 1945	SH Elli Ruslina	Mandat konstitusi baik dasar perekonomian Indonesia maupun UUD 1945 memiliki dasar konstitusional yang sama, yaitu konstitusi republic Indonesia kedua entitas ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945	Dasar perekonomian Indonesia mengacu pada kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah ,sedangkan UUD 1945 lebih berfokus pada struktur negara, hak asasi manusia, dan kewenangan Lembaga negara
14.	Problematika hak menguasai oleh negara terhadap sumber daya minyak dan gas bumi (analisis putusan mahkamah konstitusi No. 36/Puu-X/2012)	Rinaldy Prabuningtyas	Entitas ini menekankan kedaulatan negara atas sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi. Implementasi nilai-nilai kebangsaan berbasis UUD 1945 juga mencakup Upaya mempertahankan dan memperkuat kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya alam tersebut.	Putusan mahkamah konstitusi No. 36/PUU-X/2012 mungkin lebih berfokus pada isu hukum terkait hak menguasai negara terhadap sumber data minyak dan gas bumi.

15.	Peran strategi supply chain management dalam industry hulu minyak gan gas bumi	Rifki Kurniawan, Raymond H Rumambi	Implementasi nilai-nilai kebangsaan berbasis UUD 1945 dan SCM dalam industry migas keduanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Masyarakat Indonesia	Dalam mengatasi tantangan regulasi dan persoalan dalam industry migas, strategi supply chain management dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, kualitas produk, dan keandalan pasokan.
-----	--	------------------------------------	---	--

HASIL DAN PEMBAHASAN (Sub judul level 1)

No.	Klasifikasi Perbedaan (Y)	Implementasi (X)	Analisa Hipotesis
1.	Pada klasifikasi perbedaan jurnal no 2,7,13 mengenai tentang pemenuhan HAM rakyat Indonesia khususnya kaitannya dengan BP Migas adalah sebuah bentuk pengingkaran terhadap konvensi internasional dibidang ekonomi social dan budaya. menjadi fokus harmonisasi yaitu dari aspek-aspek hukumnya, pengaturan tentang kewenangan, tujuan pengaturan dan		Y^1 dan X^1 saling berhubungan karena pentingnya pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi rakyat Indonesia, terutama dalam konteks industri migas yang diwakili oleh BP Migas. Pemenuhan HAM menjadi esensial karena melibatkan hak-hak dasar rakyat, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat dan hak atas pengembangan ekonomi yang adil.

	<p>keberpihakan pengaturan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dasar perekonomian Indonesia mengacu pada kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah</p>		
2.	<p>pada klasifikasi perbedaan jurnal no 3,4,5,13,14 membahas tentang UU migas, UU no. 40 tahun 2009, pasal 33 UU 1945, UUD 1945, No. 36/PUU-X/2012. merupakan bentuk upaya dalam proses pembangunan bangsa, dimana pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan untuk mewujudkan fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. dimaksud terlihat jelas bahwa</p>		<p>Y^2 dan X^1 saling berhubungan karena membahas tentang UU migas, UU no. 40 tahun 2009, pasal 33 UU 1945, UUD 1945, No. 36/PUU-X/2012. merupakan bentuk upaya dalam proses pembangunan bangsa, dimana pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan untuk mewujudkan fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional.</p>

	sistem perekonomian nasional Indonesia ditujukan untuk kesejahteraan sosial		
3.	pada klasifikasi perbedaan jurna no 1,6, 8,9 membahas mengenai globalisasi perekonomian, tentang perkembangan politik yang terjadi pada zaman Orde Baru, kekuatan politik yang berkuasa di seluruh jajaran eksekutif ternyata juga mampu bermanuver dan mendominasi Dewan Perwakilan Rakyat. mengenai tentang ‘MEA Policy and Strategy ¹²⁸ ’ tertentu yang secara berkala dievaluasi dan dikembangkan untuk terus maju secara bersama di kawasan ASEAN ini.	UUD 1945	Y ³ dan X ¹ tidak saling berhubungan
4.	Pada klasifikasi perbedaan jurna no 10 dan 11 membahas mengenai karakter		Y ⁴ dan X ¹ saling berhubungan karena keduanya membahas aspek-aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang terkait

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN BERBASIS UUD 1945, DALAM PENERAPAN TANTANGAN REGULASI DAN PERSOALAN DALAM INDUSTRI MIGAS INDONESIA

	<p>budaya bangsa lebih menonjol aspek-aspek sosial dan budaya dalam menghadapi tantangan tersebut. mungkin lebih terkait dengan industri migas yang memiliki Sejarah Panjang dalam pembentukan ekonomi Indonesia sementara blue economy dapat lebih memperkuat kedaulatan maritim dan identitas nasional.</p>		<p>dengan pembangunan indonesia</p>
<p>5.</p>	<p>Pada klasifikasi perbedaan jurnal no 9 dan 15 mengenai rekonstruksi regulasi dan Dalam mengatasi tantangan regulasi dan persoalan dalam industri migas, strategi supply chain management dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, kualitas produk, dan keandalan pasokan</p>		<p>Y^5 dan X^1 tidak saling berhubungan</p>

Implementasi nilai-nilai kebangsaan berbasis Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam menghadapi tantangan regulasi dan persoalan dalam industri migas Indonesia

merupakan aspek penting yang memengaruhi kedaulatan energi negara. Dalam konteks ini, hasil analisis menunjukkan beberapa temuan yang relevan:

1. Tantangan Regulasi dalam Industri Migas Indonesia

Industri Migas Indonesia dihadapkan pada regulasi yang kompleks dan seringkali ambigu, yang dapat menghambat efisiensi dan inovasi dalam industri tersebut. Regulasi yang tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku industri, sehingga perlu adanya upaya untuk menyederhanakan dan mengkonsolidasikan regulasi yang berlaku. (Prabuningtyas, 2018)

Industri migas Indonesia dihadapkan pada regulasi yang kompleks, yang seringkali menjadi hambatan dalam pengembangan industri ini. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan penyempurnaan regulasi yang lebih berorientasi pada kepentingan nasional. Hal ini mencakup harmonisasi regulasi yang ada, peningkatan koordinasi antara berbagai lembaga terkait, serta pemangkasan regulasi yang tidak efektif. (Rifki & Rumambi, 2019)

- a. Regulasi yang kompleks: Industri migas Indonesia diatur oleh berbagai peraturan yang kompleks, termasuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri.
- b. Tata kelola yang belum optimal: Tata kelola industri migas masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

2. Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Berbasis UUD 1945

Implementasi nilai-nilai kebangsaan berbasis UUD 1945 dalam industri migas Indonesia menjadi kunci penting dalam membangun industri yang berkelanjutan dan berkeadilan. Nilai-nilai kebangsaan tersebut, seperti keterbukaan, keadilan, dan keberlanjutan, harus tercermin dalam setiap aspek regulasi dan tata kelola industri migas. (Baswir, 2003)

- Penyempurnaan regulasi berorientasi pada kepentingan nasional: Regulasi industri migas perlu disesuaikan dengan nilai-nilai kebangsaan yang mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan individu atau kelompok.
- Peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel: Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memperbaiki tata kelola industri migas agar lebih transparan dan akuntabel, termasuk dalam hal pemantauan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

3. Pentingnya Tata Kelola yang Baik

Tata kelola yang baik sangat diperlukan dalam industri migas Indonesia untuk memastikan bahwa nilai-nilai kebangsaan dapat diimplementasikan dengan efektif. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola yang baik dalam industri migas. (Radhi, n.d.)

Selain itu, tata kelola industri migas yang belum optimal juga menjadi persoalan serius. Diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola industri migas, termasuk dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Langkah-langkah konkret seperti penguatan peran lembaga pengawas, peningkatan keterlibatan masyarakat lokal, dan penerapan prinsip-prinsip good governance dapat membantu meningkatkan tata kelola industri migas. (Nasution, 2022)

4. . Perlindungan Lingkungan dan Masyarakat

Industri migas seringkali dihadapkan pada masalah terkait dengan dampak lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan masyarakat sekitar sebagai bagian integral dari implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam industri migas. Selain itu, isu-isu lingkungan dan sosial juga perlu mendapatkan perhatian yang serius. Industri migas seringkali berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitar, sehingga diperlukan komitmen yang kuat untuk melindungi lingkungan dan memperhatikan kepentingan masyarakat dalam setiap kegiatan industri migas. Upaya-upaya seperti penerapan teknologi ramah lingkungan, pemantauan secara ketat terhadap dampak lingkungan, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dapat membantu mengatasi masalah ini. (Abdul, 2005)

5. Kerja Sama antara Pemerintah, Industri, dan Masyarakat

Kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencapai tujuan implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam industri migas Indonesia. Sinergi antara ketiga pihak ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk implementasi nilai-nilai kebangsaan dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Pentingnya kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat juga menjadi sorotan dalam penelitian ini. Dalam menghadapi tantangan regulasi dan persoalan tata kelola dalam industri migas, kerja sama yang baik antara berbagai pihak menjadi kunci dalam mencapai tujuan bersama. (Ruslina, 2012)

Dari hasil analisis, kami menemukan bahwa industri migas Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk regulasi yang rumit dan persoalan tata kelola yang belum optimal. Implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam regulasi industri migas dapat menjadi landasan untuk memperkuat kedaulatan energi negara.

Salah satu langkah yang diperlukan adalah penyempurnaan regulasi yang lebih berorientasi pada kepentingan nasional. Hal ini melibatkan revisi atau penyusunan kembali regulasi yang memperkuat posisi Indonesia dalam mengelola sumber daya migas secara berkelanjutan. Selain itu, peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel juga penting untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam industri migas.

Selain regulasi dan tata kelola, perlindungan lingkungan dan masyarakat sekitar juga menjadi fokus penting dalam implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam industri migas. Komitmen yang kuat dari pemerintah, industri, dan masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup dan memperhatikan kepentingan sosial akan membantu menciptakan industri migas yang berkelanjutan dan berkeadilan.(Eko & Kiono, 2021)

Dalam konteks kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat, kami menyoroti pentingnya dialog dan kolaborasi yang terus-menerus. Melalui komunikasi yang baik dan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait, implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam industri migas dapat menjadi kenyataan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Implementasi nilai-nilai kebangsaan berbasis UUD 1945 dalam menghadapi tantangan regulasi dan persoalan dalam industri migas Indonesia merupakan hal yang penting untuk memperkuat kedaulatan energi negara. Dalam konteks ini, penelitian ini menunjukkan bahwa industri migas Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk regulasi yang kompleks dan persoalan tata kelola yang belum optimal.(Alwan & Istinganatul, 2017)

Salah satu hasil utama dari penelitian ini adalah pemahaman mendalam tentang kompleksitas industri migas Indonesia dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memperkuat implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam regulasi dan tata kelola industri tersebut. Analisis ini menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam regulasi industri migas dapat menjadi landasan yang kuat dalam menjaga kedaulatan energi negara.

Langkah-langkah yang diusulkan untuk meningkatkan implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam industri migas Indonesia antara lain adalah penyempurnaan regulasi yang lebih berorientasi pada kepentingan nasional, peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta penguatan komitmen terhadap upaya perlindungan lingkungan dan masyarakat sekitar. Kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan ini.

Dalam konteks implementasi nilai-nilai kebangsaan, peran pemerintah sebagai regulator dan pemegang kebijakan sangatlah penting. Pemerintah perlu mendorong adopsi

nilai-nilai kebangsaan dalam pembentukan regulasi yang berdampak pada industri migas, sehingga regulasi tersebut dapat mencerminkan kepentingan nasional dan memperkuat kedaulatan energi negara.

Di sisi lain, industri migas juga memiliki peran penting dalam memperkuat implementasi nilai-nilai kebangsaan. Industri perlu berkomitmen untuk menjalankan praktik-praktik yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, seperti tata kelola yang baik, perlindungan lingkungan, dan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai kebangsaan berbasis UUD 1945 dalam industri migas Indonesia dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tantangan regulasi dan persoalan dalam industri ini. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan industri migas Indonesia dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan nasional sambil tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. (Kadek, 2009)

KESIMPULAN DAN SARAN

Industri Migas Indonesia memiliki peran yang strategis dalam perekonomian negara, namun dihadapkan pada berbagai tantangan regulasi dan persoalan tata kelola yang kompleks. Implementasi nilai-nilai kebangsaan berbasis UUD 1945 dalam industri ini menjadi kunci penting untuk memperkuat kedaulatan energi negara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam industri migas Indonesia dapat memperkuat kedaulatan energi negara melalui pembentukan regulasi yang berorientasi pada kepentingan nasional, peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta penguatan komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan masyarakat sekitar. Kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan ini.

Implementasi nilai-nilai kebangsaan berbasis UUD 1945 dalam industri migas Indonesia memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan regulasi dan persoalan yang kompleks. Melalui penyempurnaan regulasi yang berorientasi pada kepentingan nasional, peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan masyarakat sekitar, industri migas dapat menjadi lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat juga menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan adopsi nilai-nilai kebangsaan dalam

regulasi dan praktik industri migas, diharapkan Indonesia dapat memperkuat kedaulatan energinya dan memajukan pembangunan nasional secara holistik.

Pemerintah memiliki peran penting sebagai regulator dan pemegang kebijakan dalam mendorong adopsi nilai-nilai kebangsaan dalam regulasi industri migas. Sementara itu, industri migas perlu berkomitmen untuk menjalankan praktik-praktik yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, seperti tata kelola yang baik, perlindungan lingkungan, dan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar.

Secara keseluruhan, implementasi nilai-nilai kebangsaan berbasis UUD 1945 dalam industri migas Indonesia dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan regulasi dan persoalan dalam industri ini. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan industri migas Indonesia dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan nasional sambil tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul, W. (2005). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implimentasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Alwan, B. F., & Istinganatul, N. (2017). Implementasi Nilai-Nilai Karakter Budaya Bangsa. *Untirta Civic Education Journal*.
- Bagir, M. (1992). *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*.
- Bahrul, I. (2022). Rekonstruksi Regulasi Dana Pasca Operasional Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Berbasis Nilai Keadilan. *Diss. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG*.
- Bappenas. (2015). *Reformasi Regulasi Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib*.
- Baswir, R. (2003). *Ekonomi Rakyat, Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional, mimeo*. Kapustep UGM, Yogyakarta.
- Delliamov. (2006). *Ekonomi Politik*. Erlangga.
- Eko, S. A., & Kiono, B. F. T. (2021). Dari energi fosil menuju energi terbarukan: potret kondisi minyak dan gas bumi Indonesia tahun 2020–2050. *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan*.
- Harsono, H. (2002). *Implementasi Kebijakan Dan Politik*. Mutiara Sumber Widya.
- Kadek, P. S. (2009). *Delegasi Regulasi Dan Simplifikasi Regulasi Dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah*.
- Nasution, M. (2022). Potensi Dan Tantangan Blue Economy Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Kajian Literatur. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*.
- Prabuningtyas, P. (2018). *Problematika Hak Menguasai Oleh Negara Terhadap Sumber*

Daya Minyak Dan Gas Bumi.

- Radhi, F. (n.d.). Merebut kembali kedaulatan MIGAS: Mencapai Kedaulatan Energi Dengan Mewujudkan Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang Berlandaskan Konstitusi. *Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Studi Energi UGM.*
- Rifki, K., & Rumambi, R. H. (2019). Peran Strategi Supply Chain Management Dalam Industri Hulu Minyak Dan Gas Bumi. *Jurnal Penelitian Tambang.*
- Ruslina, E. (2012). *Dasar perekonomian Indonesia dalam penyimpangan mandat konstitusi UUD negara tahun 1945 Vol. 1.* Total Media.